

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN ADMINISTRASI

NO	JENIS LAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	UNIT KERJA PENGOLAH
1	Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota	7 hari kerja	Sekretariat Jenderal
2	Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota	7 hari kerja	
3	Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemda	7 hari kerja	
4	Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Kemendagri	7 hari kerja	
5	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS)	180 hari kerja	
6	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) bagi ASN Kemendagri	180 hari kerja	

NO	JENIS LAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	UNIT KERJA PENGOLAH
7	Penerbitan Kepmendagri tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi	12 hari kerja	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
8	Penerbitan Kepmendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota	12 hari kerja	
9	Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 hari kerja	
10	Penggantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 hari kerja	
11	Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah	12 hari kerja	
12	Mutasi Antar Daerah	15 hari kerja	

NO	JENIS LAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	UNIT KERJA PENGOLAH
13	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	5 hari kerja	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
14	Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing	4 hari kerja	
15	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Organisasi Kemasyarakatan	15 hari kerja	
16	Pengusulan Calon Peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	300 hari kerja	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
17	Pengusulan Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	35 hari kerja	
18	Pengusulan Perpanjangan Kartu Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	35 hari kerja	

NO	JENIS LAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	UNIT KERJA PENGOLAH
19	Evaluasi Ranperda Provinsi tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Provinsi	15 hari kerja	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
20	Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi	15 hari kerja	
21	Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	15 hari kerja	
22	Pertimbangan Pinjaman Daerah Jangka Menengah dan Jangka Panjang	15 hari kerja	
23	Rekomendasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	9 hari kerja	
24	Penilaian Usulan Rencana Pendirian BUMD Provinsi / Kabupaten / Kota	15 hari kerja	

NO	JENIS LAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	UNIT KERJA PENGOLAH
25	Evaluasi Ranperda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan RTR Kawasan Strategis Provinsi	15 hari kerja	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
26	Evaluasi Ranperda Provinsi tentang RPJPD/RPJMD Provinsi	15 hari kerja	
27	Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi	3 hari kerja	Inspektorat Jenderal
28	Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan	1 hari kerja	
29	Rekomendasi Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Pembantu Provinsi	7 hari kerja	
30	Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi Inspektur Daerah	7 hari kerja	

NO	JENIS LAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	UNIT KERJA PENGOLAH
31	Penerbitan Surat Rekomendasi Orientasi/Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota	14 hari kerja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32	Nomor Registrasi Orientasi/ Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota	3 hari kerja	